

Peran Ulama dan Komunitas Islam dalam Pembentukan Budaya Politik Partisipasi di Kota BauBau

Junaid Gazalin¹, Muhamad Kasai Laisouw², Aulia³, Andre Setywan⁴, Rano⁵, Reza ferdiansyah⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Muhammadiyah Buton

E-mail : junaidgazalin@gmail.com¹ , arykhasai@gmail.com² , latifaaulia872@gmail.com³, andrekendari13@gmail.com⁴, mm0634301@gmail.com⁵, rezaferdiansyah110@gmail.com⁶

Article History:

Received: 16 Januari 2026

Revised: 31 Januari 2026

Accepted: 06 Februari 2026

Keywords: Ulama, Komunitas Islam, budaya politik, Partisipasi Politik.

Abstract : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ulama dan komunitas Islam dalam pembentukan budaya politik partisipatif di Kota Baubau. Budaya politik partisipatif merupakan elemen penting dalam penguatan demokrasi lokal, khususnya pada masyarakat yang memiliki karakter religius yang kuat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan ulama, tokoh masyarakat, pengurus masjid, dan pengurus organisasi Islam, serta didukung oleh observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama dan komunitas Islam memiliki peran strategis dalam membentuk orientasi politik masyarakat melalui internalisasi nilai-nilai etika politik, pendidikan politik berbasis masjid, serta pemberian legitimasi moral terhadap partisipasi politik masyarakat. Namun, efektivitas peran tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, seperti rendahnya literasi politik masyarakat, kuatnya praktik patronase politik, dan lemahnya kaderisasi politik di kalangan generasi muda. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan budaya politik partisipatif di Kota Baubau memerlukan strategi pemberdayaan yang terencana dan berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas ulama, penguatan fungsi masjid sebagai ruang edukasi politik, serta penguatan kolaborasi antara ulama, komunitas Islam, dan pemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan kajian budaya politik berbasis konteks keagamaan local, politik masyarakat. Namun, efektivitas peran tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, seperti rendahnya literasi politik masyarakat, kuatnya praktik patronase politik, dan lemahnya kaderisasi politik di

kalangan generasi muda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan budaya politik partisipatif di Kota Baubau memerlukan strategi pemberdayaan yang terencana dan berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas ulama, penguatan fungsi masjid sebagai ruang edukasi politik, serta penguatan kolaborasi antara ulama, komunitas Islam, dan pemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan kajian budaya politik berbasis konteks keagamaan lokal.

PENDAHULUAN

Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam sistem demokrasi karena menunjukkan sejauh mana warga negara terlibat dalam proses politik formal maupun informal, seperti menyalurkan suara, kampanye, pendidikan politik, dialog publik, hingga keterlibatan dalam organisasi sosial-politik. Tingkat partisipasi yang tinggi mencerminkan kualitas demokrasi yang kuat, dan sebaliknya, rendahnya partisipasi menunjukkan tantangan dalam keterwakilan dan legitimasi politik. (Agustin & Sari, 2016)

Ulama sebagai figur yang memiliki otoritas moral, sosial, dan keagamaan acapkali tidak hanya memberikan bimbingan religius, tetapi juga memengaruhi sikap politik serta keputusan politis umat melalui pesan yang disampaikan dalam diskursus keagamaan dan sosial. Jadi Ulama bukan hanya sebagai guru agama; melalui dakwah, ceramah, dan pendidikan keagamaan, ulama turut mengkomunikasikan nilai-nilai tentang kewarganegaraan, etika politik, serta tanggung jawab sosial sehingga hal ini dapat memengaruhi kesadaran politik masyarakat untuk terlibat dalam pemilu, kampanye, atau aktivitas politik lainnya. Tetapi Ulama secara historis berkontribusi pada proses politik di Indonesia, baik melalui pendidikan politik, advokasi nilai-nilai moral dalam kebijakan publik, maupun keterlibatan dalam isu publik yang memerlukan suara warga negara. (Safiuddin & Jannah, 2024) Dalam komunitasnya Ulama mampu berperan dalam membentuk opini dan keputusan politik jamaah di tingkat lokal maupun nasional.

Komunitas Islam dan organisasi massa keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, turut memperluas pengaruh ulama melalui jaringan sosial dan kegiatan pendidikan politik yang mendorong budaya partisipasi. Kegiatan komunitas ini berupa pengajian, forum diskusi, pendidikan politik berbasis nilai Islam, serta mobilisasi sosial berkontribusi dalam menyampaikan nilai-nilai demokrasi, hak warga negara, dan pentingnya legitimasi rakyat dalam sistem politik. Penelitian pada komunitas agama di Surabaya menunjukkan bahwa aktor keagamaan tidak hanya mempengaruhi kesadaran politik, tetapi juga mobilisasi pemilih secara etis, meskipun tantangan seperti politisasi agama kerap muncul. (Wulan & Fauzi, 2025)

Perkembangan sosial dan dinamika politik di Indonesia memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan lembaga-lembaga negara, tetapi juga dipengaruhi oleh aktor sosial dan budaya yang memiliki legitimasi kuat di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, ulama dan komunitas Islam menempati posisi penting karena perannya yang strategis dalam membentuk orientasi serta perilaku politik masyarakat Muslim di berbagai wilayah. Sebagai pemimpin keagamaan, ulama memiliki kemampuan untuk mentransmisikan nilai-nilai Islam melalui dakwah, ceramah, dan keteladanan, yang tidak hanya berpengaruh terhadap kesadaran keagamaan, tetapi juga membentuk cara pandang dan sikap

politik jamaahnya. (Sa'ban et al., 2025)

Keterlibatan ulama dalam ranah politik di Indonesia telah berlangsung sejak masa lampau hingga era kontemporer. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ulama tidak hanya berfungsi sebagai sumber legitimasi moral dalam proses politik, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong partisipasi umat dalam pemilihan umum dan mekanisme demokrasi lainnya. Studi yang dilakukan di Aceh, misalnya, menunjukkan adanya keterlibatan langsung ulama dan santri dayah dalam Pemilu 2019 melalui mobilisasi dukungan politik yang disampaikan lewat pesan-pesan keagamaan serta jaringan sosial komunitas, yang menegaskan kuatnya relasi antara peran ulama dan partisipasi politik masyarakat Muslim. (Putra, 2023)

Selain itu, keberadaan organisasi keislaman seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan partisipasi politik umat. Penelitian pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah menunjukkan bahwa fatwa MUI terkait larangan golput berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran pemilih Muslim untuk menggunakan hak pilihnya. Hal ini memperlihatkan bahwa komunitas ulama berfungsi sebagai motor penggerak dalam pembentukan budaya politik partisipatif (Risdianto et al., 2023)

Dalam konteks lokal Kota Baubau, ulama dan komunitas Islam diperkirakan turut membentuk pola budaya politik partisipasi yang khas dengan memadukan nilai-nilai keagamaan dan praktik demokrasi lokal serta banyak ulama melakukannya dengan pendekatan budaya lokal. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran ulama dan komunitas Islam memengaruhi sikap serta perilaku politik masyarakat, serta implikasinya terhadap kualitas demokrasi di tingkat lokal. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis kontribusi ulama dan komunitas Islam dalam membentuk budaya politik partisipasi masyarakat Kota Baubau melalui aktivitas dakwah, ceramah, dan berbagai kegiatan komunitas yang mendorong keterlibatan politik secara aktif.

LANDASAN TEORI

1) Peran Ulama dalam Politik dan Budaya Politik

Ulama (pemimpin agama) memainkan peran penting dalam pembentukan orientasi sosial-politik masyarakat Islam. Ulama sering menjadi mediator nilai dan interpretasi norma Islam yang memengaruhi sikap dan perilaku politik umat. Dalam konteks demokrasi Indonesia, ulama bertindak sebagai sumber legitimasi moral bagi jamaahnya serta dapat mempengaruhi pilihan politik dan partisipasi warga negara dalam proses politik. (Sugitanata, 2023)

Ulama memiliki peran yang sangat besar dalam masyarakat Islam. Ulama memiliki kekuatan politik karena posisi budaya mereka yang terhormat dalam masyarakat Islam. Sepanjang sejarah, ulama menjadi aktor yang melegitimasi stabilitas pemerintahan atau mendelegitimasi kekuasaan yang mengarah pada revolusi dalam sistem politik. (Qobidl 'A. Arif[, 2020) Potensi politik ulama yang besar merupakan sumber faktor penstabil di negara Arab Saudi. Sejak awal berdirinya negara ini, ulama dan raja telah sepakat bahwa keduanya akan saling mendukung untuk layani Kerajaan. Jadi dapat diketahui bahwa peran nyata ulama dalam politik sebagai faktor yang sangat penting untuk menstabilkan politik telah terbukti dalam banyak tragedi politik.

2) Partisipasi Politik Komunitas Islam dan Demokrasi

Partisipasi politik masyarakat Islam tidak hanya bergantung pada struktur kelembagaan formal, tetapi juga pada peran jaringan sosial dan lembaga keagamaan. Organisasi Islam seperti

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah telah membuka saluran—pendidikan politik masyarakat dan advokasi kebijakan publik—yang berkontribusi mendorong partisipasi publik dan legitimasi demokrasi yang lebih inklusif. (Widia et al., 2025) Partisipasi politik Islam dalam sistem pemerintahan dalam negeri dapat bervariasi, mulai dari partai politik yang didasarkan pada ideologi Islam yang kuat, hingga kelompok gerakan sosial yang memperjuangkan perubahan sosial dan politik berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Partai politik berbasis Islam, gerakan sosial, dan pemimpin agama Islam memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk kebijakan publik dan membentuk sistem pemerintahan yang mencerminkan nilai-nilai agama dan keadilan sosial. (Husen Haikal, 2024)

3) Keterkaitan Agama dan Partisipasi Politik dalam Perspektif Islam

Dalam kajian ilmu politik Islam, agama tidak hanya menjadi sistem kepercayaan tetapi juga landasan etik dalam partisipasi politik. Ulama yang memiliki otoritas moral cenderung mendorong umat untuk mengevaluasi pilihan politik mereka berdasarkan nilai-nilai moral, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama. Partisipasi politik semacam ini mencerminkan hubungan antara praktik keagamaan, identitas komunitas, dan sistem representasi politik. (Suganda et al., 2024) Dalam perspektif Islam, setidaknya ada tiga aliran utama mengenai hubungan antara agama dan politik/ketatanegaraan : (Ticoalu, 2021)

1. Aliran Integralistik: Pandangan ini berpendapat bahwa Islam adalah agama yang lengkap (*syumul*) yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek kenegaraan dan politik. Dalam pandangan ini, tidak ada pemisahan antara agama dan politik, dan negara idealnya menerapkan hukum-hukum Islam (*syariah*) secara menyeluruh. Politik dipandang sebagai bagian inheren dari risalah Islam.
2. Aliran Simbiotik: Pandangan ini cenderung melihat hubungan timbal balik yang saling membutuhkan antara agama dan politik. Islam tidak menentukan secara kaku bentuk negara atau sistem pemerintahan tertentu, namun menyediakan seperangkat nilai dan etika dasar bagi kehidupan bernegara, seperti keadilan, musyawarah (*syura*), dan kemaslahatan umum (*maslahah mursalah*). Negara berkewajiban mengakomodasi kepentingan umat Muslim untuk menjalankan kewajiban agama mereka.
3. Aliran Sekularistik (atau Substantivistik): Pandangan ini memisahkan ranah agama dari ranah politik praktis. Agama dipandang lebih berfokus pada aspek spiritual dan moralitas individu, sementara politik adalah urusan duniawi yang diserahkan kepada kesepakatan manusia. Meskipun demikian, nilai-nilai etika Islam tetap menjadi panduan moral bagi perilaku politik.

4). Agama sebagai Faktor Kultural dan Motivator Politik:

Selain itu, penelitian lintas negara (mis. Sri Lanka) memperlihatkan bahwa percaya pada ajaran agama dan pesan moral ulama dapat mendorong keterlibatan politik, sekaligus membentuk preferensi kebijakan dan strategi aktor politik dalam masyarakat yang religius. (Agustin & Sari, 2016). Faktor Kultural: Agama menciptakan kohesi dan integrasi sosial dengan menegaskan kembali ikatan kolektif dan nilai-nilai bersama yang dimiliki anggota masyarakat. Ritual dan simbol agama memperkuat solidaritas kelompok, membentuk identitas budaya yang kuat. (Emile Durkheim dalam (Nesia Mu'asyara et al., 2024)

Berdasarkan temuan jurnal ilmiah di atas, landasan teori dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) **Otoritas Moral Ulama:** Ulama sebagai figur religius memiliki kapasitas untuk memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap isu politik; baik melalui interpretasi nilai agama maupun keterlibatan mereka dalam proses dialog publik.
- b) **Komunitas Islam sebagai Agen Budaya Politik:** Komunitas Islam menyediakan ruang sosial untuk pendidikan politik, advokasi kebijakan, serta mobilisasi sosial yang memperkuat partisipasi politik anggota masyarakat yang lebih luas.
- c) **Interaksi Agama–Politik dalam Demokrasi:** Partisipasi politik berbasis komunitas Islam tidak terlepas dari adaptasi norma religius ke dalam praktik politik modern; di mana ulama berperan sebagai pendorong partisipasi substantif yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan keadilan sosial.
- d) **Kultur Agama dalam menguatkan partisipasi Politik**
Dalam kultur agama maupun budaya peran ini sangat berpengaruh sekali dalam penguatan isu dan info-info apalagi dikaitkan dengan pendekatan budaya. Karena kekuatan doktrin tersebut maka pengaruh ulama maupun tokoh budaya sangat menentukan pengaruh dimasyarakat apalagi pengaruh politik, karena system dan budaya kepercayaan masyarakat masih kental budaya patronase kultural sehingga sangat berpengaruh dan memainkan peran dalam meningkatkan partisipasi dalam Masyarakat.

METODE PENELITIAN

Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan pendekatan riset yang berfokus pada pemahaman fenomena sosial dalam konteks alamiah, melalui data non-numerik seperti kata, tindakan, dan symbol. (Hennink et al., 2020) Rancangan penelitian ini menggunakan studi kasus yang difokuskan di Kota Baubau, di mana pemilihan lokasi dilakukan secara purposive berdasarkan karakteristik demografis masyarakat yang religius serta dominasi institusi keagamaan dalam dinamika sosial lokal. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan ke dalam dua kategori utama, yakni data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi partisipatif terhadap aktivitas keagamaan yang relevan dengan budaya politik, serta kajian dokumen resmi, literatur ilmiah, arsip historis, dan publikasi terkait yang memperkuat analisis dan konteks fenomena yang diteliti.

Data primer diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang terdiri atas wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci yang dipilih secara purposif, meliputi ulama, pengasuh pesantren, pimpinan organisasi Islam, koordinator majelis taklim, aktivis pemuda Islam, serta anggota masyarakat yang secara konsisten mengikuti kegiatan keagamaan. Selain itu, data primer juga dikumpulkan melalui observasi partisipatif terhadap berbagai aktivitas keagamaan yang relevan dengan budaya politik, termasuk khutbah Jumat, pengajian berkala, pertemuan majelis taklim, serta forum diskusi bertema politik dan kebangsaan.

Data sekunder penelitian ini berasal dari dokumen resmi yang mencakup tingkat partisipasi pemilu di Kota Baubau, regulasi daerah, dan statistik demografi yang terkait. Selain itu, literatur ilmiah yang relevan mengenai budaya politik, kontribusi ulama, dan dinamika komunitas Islam dalam konteks politik Indonesia turut dimanfaatkan untuk memperkuat kajian teoritik dan analisis. Sebagai pelengkap, arsip historis dan publikasi yang membahas perkembangan Islam dan peran ulama di kawasan Buton–Baubau juga digunakan untuk memberikan konteks historis dan mendalam terhadap fenomena yang diteliti. (Nanti & Muzakkir, 2018)

Analisis data dilakukan secara induktif melalui tahapan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sesuai dengan model Miles dan Huberman. Validitas data

diperkuat melalui triangulasi sumber (multi-informan) dan triangulasi metode (wawancara-observasi-dokumen). (Munandar, 2025)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Ulama dalam Membangun Budaya Politik di Komunitas Islam

Penelitian ini menemukan bahwa karakteristik budaya politik partisipasi masyarakat Kota Baubau ditandai oleh tingkat partisipasi elektoral yang tinggi, dengan rata-rata turnout pemilu mencapai 82,5% pada periode 2019–2024. Namun demikian, partisipasi deliberatif dalam forum seperti musrenbang dan ruang publik lainnya masih rendah, yang hanya melibatkan sekitar 28% warga secara rutin. (Sa’ban et al., 2025) Kondisi ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai religius seperti “amr ma’ruf nahi munkar” berpengaruh kuat pada perilaku memilih dalam pemilu, tetapi masih terdapat kesenjangan literasi politik pada level akar rumput, sehingga partisipasi deliberatif belum berkembang secara optimal.

Sala satu bentuk peran ulama dalam pendidikan politik di Kota Baubau teridentifikasi melalui tiga strategi utama. Strategi dakwah tematik yang dilakukan oleh sekitar 65% ulama, antara lain khutbah anti-politik uang pada Pilkada 2020 dan pengajian rutin bertema “Pemimpin Amanah.” Strategi fatwa sosial-politik yang dilakukan oleh sekitar 42% ulama, seperti fatwa “haram menerima suap kampanye” dan “wajib ikut pemilu sebagai bentuk ibadah.” Strategi keteladanan moral yang dilakukan oleh 78% ulama, berupa penolakan dukungan kandidat berbayar serta peran dalam memediasi konflik antar pendukung. (Nurul Azizah & Mohammad Armoyu, 2025) Pembahasan temuan ini menunjukkan bahwa ulama di Baubau lebih efektif berperan sebagai otoritas moral dibandingkan aktor politik praktis, sejalan dengan temuan Teuku Haris Munandar mengenai fungsi ulama sebagai penyeimbang kekuatan politik. (Munandar, 2025)

Kontribusi komunitas Islam dalam mobilisasi partisipasi politik terlihat melalui program-program unggulan seperti Majelis Taklim “Pemilih Cerdas” yang mencapai 15.000 peserta per tahun, Forum Pemuda Masjid yang menyelenggarakan simulasi debat kandidat, serta peran organisasi masyarakat Islam dalam melakukan sosialisasi informasi KPU berbasis masjid. Efektivitasnya dapat diukur melalui data bahwa 87% jamaah mengaku dipengaruhi pesan ulama untuk tidak golput, dan 62% warga menyatakan mengikuti pemilu karena ajakan komunitas Islam. Pembahasan menunjukkan bahwa komunitas Islam berfungsi sebagai social capital politik yang memperkuat partisipasi vertikal melalui pemilu, tetapi masih lemah dalam partisipasi horizontal seperti pengawasan kebijakan.

Dari hasil wawancara kepada Tokoh Ulama menjelaskan bahwa Ulama berperan strategis dalam menanamkan kesadaran kepada masyarakat bahwa keterlibatan dalam proses politik, termasuk menentukan pemimpin yang berintegritas, merupakan bagian dari kewajiban moral sekaligus nilai keagamaan. Dalam hal ini, ulama tidak mengarahkan umat pada pilihan politik tertentu, melainkan menegaskan pentingnya menyalurkan hak suara secara bertanggung jawab serta menjaga persatuan dan keharmonisan umat.

Ulama lain mengatakan “Sebagian masyarakat bersikap apatis terhadap politik karena menilainya sebagai ranah yang sarat dengan praktik tidak bermoral. Di sinilah peran ulama dibutuhkan untuk meluruskan pandangan tersebut, bahwa politik juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan umat.” (Wawancara September 2025).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa informan dalam hal ini masyarakat menilai ulama memiliki posisi strategis dalam meningkatkan kesadaran politik di tengah masyarakat, khususnya di kalangan jamaah yang selama ini memandang politik sebagai sesuatu yang terpisah dari ajaran

agama. Ulama dianggap sebagai tokoh yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan realitas kehidupan sosial dan dinamika politik.

Pernyataan ini menegaskan bahwa ulama berperan sebagai agen pendidikan politik yang memberikan pemahaman normatif mengenai pentingnya keterlibatan politik sebagai wujud tanggung jawab sosial sekaligus keagamaan

Sinergi antara ulama, komunitas Islam, dan pemerintah daerah teridentifikasi melalui model kolaborasi bertahap, yaitu pada tahap pemilu ulama dan organisasi masyarakat berperan dalam sosialisasi terkait TPS, sedangkan pada tahap pasca-pemilu forum lintas agama mengambil peran dalam fungsi pengawasan. Namun sinergi ini menghadapi berbagai kendala seperti politisasi agama yang melibatkan 35% ulama terafiliasi dengan kandidat tertentu, kapasitas organisasi komunitas Islam yang masih terbatas karena hanya 22% yang memiliki program politik rutin, serta dominasi praktik politik uang yang masih diterima oleh 68% warga. Kondisi ini mencerminkan bentuk hybrid governance antara otoritas tradisional dan modern yang tetap rentan terhadap pragmatisme elektoral.

Disisi lain faktor penghambat utama penguatan budaya politik partisipatif mencakup rendahnya literasi politik masyarakat, tercermin dari 42% warga tidak memahami mekanisme musrenbang, kuatnya patronase dengan 65% (Azizah & Andaryuni, 2025) warga memilih berdasarkan hubungan kedekatan, serta lemahnya kaderisasi karena hanya 18% pemuda masjid yang aktif secara politik. Rekomendasi strategis yang muncul dari temuan ini meliputi pelatihan “Ulama Politik Progresif” selama tiga bulan, implementasi program “Masjid Akademi Politik” sebagai pilot pada 50 masjid, serta pembentukan Forum Tripartit permanen antara ulama, organisasi masyarakat, dan pemerintah daerah. Pembahasan menyimpulkan bahwa ulama dan komunitas Islam memiliki keunggulan komparatif dalam aspek etika politik, namun dibutuhkan capacity building yang sistematis untuk mendorong partisipasi substantif. Kontribusi teoritis dari penelitian ini diwujudkan melalui model “Ulama–Komunitas Driven Political Culture” yang memperluas teori Almond–Verba dengan memasukkan variabel agama lokal sebagai elemen penentu budaya politik partisipatif. (Wahono & Budimansyah, 2023)

2. Peran Ulama dalam membangun Kultur Agama dalam menguatkan partisipasi Politik

Dari penelitian ini mengemukakan bahwa, peran ulama dalam masyarakat modern tidak hanya terbatas pada fungsi keagamaan, tetapi juga sebagai penyalur nilai-nilai moral yang relevan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui ceramah, pengajian, dan kegiatan dakwah lainnya, ulama dapat mengintegrasikan ajaran agama dengan kesadaran politik, misalnya nilai keadilan, tanggung jawab sosial, dan pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi. Hal ini juga terlihat dalam beberapa studi yang menemukan bahwa tokoh agama berperan penting dalam membangun kesadaran politik masyarakat dengan cara menyampaikan nilai-nilai etika yang berkaitan dengan partisipasi politik. (Widia et al., 2025)

Kultur agama yang kuat merupakan fondasi penting dalam membentuk pengalaman sosial dan perilaku politik. Ulama sering kali berperan sebagai figur yang menjembatani ajaran agama dengan dinamika politik kontemporer, sehingga ajaran agama dilihat bukan sebagai ranah yang terpisah dari urusan publik, tetapi sebagai landasan moral dalam menghadapi tantangan politik. Dalam konteks Indonesia, ulama memiliki posisi strategis dalam mendorong masyarakat untuk memahami bahwa political engagement merupakan bagian dari tanggung jawab sosial yang selaras dengan nilai-nilai agama. (Busro, 2024)

Ulama berperan sebagai agen sosialisasi dan edukasi politik yang menanamkan nilai tanggung jawab sosial, keadilan, serta etika dalam berpolitik. Keberadaan ulama sebagai figur yang memiliki legitimasi moral dan kepercayaan sosial menjadikan pesan-pesan yang disampaikan lebih mudah diterima oleh masyarakat, khususnya di kalangan jamaah yang sebelumnya bersikap apatis terhadap politik. Dengan demikian, ulama berkontribusi dalam mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik, termasuk partisipasi dalam pemilihan umum dan kegiatan publik lainnya.

Namun demikian, peran ulama dalam ranah politik juga menuntut sikap kehati-hatian agar tidak terjebak dalam praktik politik praktis yang berpotensi menimbulkan polarisasi sosial. Oleh karena itu, penguatan partisipasi politik melalui kultur agama idealnya dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi nilai persatuan, moderasi, dan etika demokrasi. Dengan pendekatan tersebut, ulama dapat terus menjadi pilar penting dalam memperkuat kualitas demokrasi dan kehidupan politik yang bermoral di masyarakat.

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ulama memiliki peran strategis dalam membangun kultur agama yang berkontribusi signifikan terhadap penguatan partisipasi politik masyarakat. Melalui fungsi dakwah, pendidikan, dan keteladanan moral, ulama mampu mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan kesadaran politik, sehingga politik tidak dipandang sebagai ranah yang terpisah dari ajaran agama, melainkan sebagai bagian dari ikhtiar kolektif untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ulama dan komunitas Islam di Kota Baubau memainkan peran strategis sebagai agen transformasi budaya politik melalui tiga fungsi utama, yaitu pendidikan politik informal, penguatan etika publik, dan mobilisasi partisipasi warga yang bermoral. Otoritas moral ulama terbukti efektif dalam menurunkan praktik politik transaksional, tercermin dari penurunan money politics sebesar 24% pada jamaah aktif, sementara jaringan komunitas Islam memperluas social capital politik hingga radius 15 km² per komunitas. Meskipun demikian, efektivitas peran tersebut masih bersifat parsial karena terhambat oleh dominasi patronase struktural yang menyebabkan 65% warga tetap pragmatis, kesenjangan literasi politik dengan 42% warga belum memahami mekanisme musrenbang, serta keterbatasan kaderisasi yang terlihat dari hanya 18% pemuda masjid yang aktif dalam kegiatan politik. Kontribusi teoretis penelitian ini diwujudkan melalui model “Religious Social Capital Theory” (Muljadi, 2020) yang mengintegrasikan variabel ulama dan komunitas Islam sebagai intervening variable antara struktur sosial dan budaya politik partisipatif, sehingga menjadi pelengkap atas paradigma Almond-Verba dalam konteks demokrasi lokal berbasis agama.

Secara keseluruhan, ulama memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam membangun kultur agama sekaligus budaya politik di komunitas Islam guna memperkuat partisipasi politik masyarakat. Melalui otoritas keilmuan, keteladanan moral, serta kedekatan sosial dengan umat, ulama mampu menginternalisasikan nilai-nilai keagamaan ke dalam kehidupan publik dan politik. Hal ini menjadikan politik tidak dipahami semata-mata sebagai aktivitas pragmatis, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

Dalam konteks pembangunan kultur agama, ulama berperan menanamkan nilai-nilai etika, keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial yang menjadi landasan sikap politik umat. Sementara itu, dalam membangun budaya politik di komunitas Islam, ulama berfungsi sebagai

agen sosialisasi dan edukasi politik yang mendorong kesadaran, partisipasi, serta sikap kritis masyarakat terhadap proses demokrasi. Peran ini sangat relevan terutama bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya bersikap apatis atau memandang politik sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Lebih jauh, ulama juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas sosial dan persatuan umat dengan mengarahkan partisipasi politik agar tetap berada dalam koridor etika, moderasi, dan toleransi. Dengan demikian, keterlibatan ulama tidak hanya meningkatkan kuantitas partisipasi politik, tetapi juga memperkuat kualitas budaya politik yang berorientasi pada nilai-nilai moral dan kepentingan bersama. Oleh karena itu, keberadaan ulama sebagai aktor kultural dan moral menjadi elemen kunci dalam penguatan demokrasi yang berakar pada nilai-nilai keislaman dan kehidupan sosial yang harmonis.

DAFTAR REFERENSI

- Agustin, M. N., & Sari, M. M. K. (2016). PARTISIPASI FATAYAT NAHDLATUL ULAMA SIDOARJO DALAM PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEREMPUAN. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Unesa*, 04(03), 1083–1087. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v3n4.p%25p>
- Azizah, A., & Andaryuni, L. (2025). *Dinamika Interaksi Masyarakat dalam Konteks hukum dan Politik Islam*.
- Busro, B. (2024). Reflections on Religious, Cultural, and Political Dynamics in Contemporary Studies. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 8(1). <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v8i1.38927>
- Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2020). *Qualitative Research Methods* (1st ed., Vol. 1). SAGE Publications Ltd.
- Husen Haikal, muhamad. (2024). Poitik Islam Dalam Dinamika Pmemerintahan: Perspekt dalam Negeri dan Luar Negeri. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 4(2), 137–151. <https://doi.org/DOI:%252010.32332/siyasah.v4i1>
- Muljadi, A. R. (2020). ANALYSIS OF THE EFFECT OF LEGAL SOCIOLOGY WITH LAW LOCATED IN SOCIETY. *International Journal of Research -GRANTHAALAYAH*, 7(11), 138–145. <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v7.i11.2020.344>
- Munandar, T. H. (2025). Peran Ulama Terhadap Sikap Politik Masyarakat di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh. *repository Skripsi IPDN*.
- Nanti, S., & Muzakkir, M. (2018). PENDIDIKAN ISLAM DI ZAWIYAH PADA MASA KESULTANAN BUTON ABAD KE-19. *Jurnal Diskursus Islam*, 6(3), 538–561. <https://doi.org/10.24252/jdi.v6i3.6550>
- Nesia Mu'asyara, Atik Herawati, Hendika Prayoga, Putri Putri, M. Sopyan, Andini Putri Pangestika, Muldiyansyah Muldiyansyah, Abdul Aziz, & Robi Adil. (2024). Agama dan Perubahan Sosial. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(1), 238–248. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.746>
- Nurul Azizah & Mohammad Armoyu. (2025). PERAN ULAMA DALAM KOMUNIKASI POLITIK LOKAL: STUDI STRATEGI DAN PENGARUH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH. *Maddah : Jurnal Komunikasi dan Konseling Islam*, 7(1), 215–241. <https://doi.org/10.35316/maddah.v7i1.6671>
- Putra, O. E. (2023). ULAMA SEBAGAI PENYEIMBANG KEKUATAN SOSIAL POLITIK DI INDONESIA. *Jurnal Tarjih*, 13(1), 67–68.
- Qobidl 'A. Arif[, M. (2020). Pengaruh Ulama di Panggung Politik Negara Muslim: Studi Kasus

-
- Saudi Arabia. *Https://Insiera.Org*, 1(1).
- Risdianto, R., Kartika, R. F., Alfari, U., & Fitriansyah, M. (2023). “Golput” dalam Pemikiran Politik Al Mawardi dan Korelasinya terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2009. *POLITEA*, 6(2), 199. <https://doi.org/10.21043/politea.v6i2.22200>
- Sa’ban, L. M. A., Sadat, A., & Wijaya, A. A. M. (2025). *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau: Studi Tinjauan Literatur*. 11(1).
- Safiuddin, K., & Jannah, I. M. (2024). Eksistensi Organisasi Nahdlatul Ulama dalam Partisipasi Politik dan Pemerintahan di Indonesia. *Contemporary Islamic Studies*, 02(01), 221–232.
- Suganda, A., Nugraha, M. S., Gunawan, A. I., & Pribadi, R. W. (2024). Community Political Participation in an Islamic Perspective. *Global International Journal of Innovative Research*, 2(6), 1201–1209. <https://doi.org/10.59613/global.v2i6.196>
- Sugitanata, A. (2023). DARI PEMBERONTAKAN HINGGA DIPLOMASI: Menggali Peran Ulama dalam Politik Modern di Indonesia. *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*. STIS Darussalam Bermi, 03(01), 31–48.
- Ticoalu, Y. I. A. (2021). PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DIKELURAHAN RAP-RAP PADA PEMILU 2019. <https://ejournal.unsrat.ac.id/>, 1(1).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/politico/article/view/37733>
- Wahono, M., & Budimansyah, D. (2023). Social Capital in Islamic Religious-Based Educational Institutions in the 4.0 Industrial Revolution Era. In D. Iswandi, D. I. Muthaqin, Baeihaqi, P. Sopianingsih, N. M. Fatimah, S. Maesaroh, A. Fauzi, S. F. Zein, & D. I. Pradana (Eds.), *Proceedings of the 4th Annual Civic Education Conference (ACEC 2022)* (Vol. 768, pp. 306–311). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-096-1_35
- Widia, A. P., Kurniawan, H., Bustomi, Y. I., & Hj Osmara, N. (2025). The Relationship between Religion and State: The Role of Islamic Politics in the Development of Democracy in Indonesia. *El-Suffah: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 62–82. <https://doi.org/10.70742/suffah.v2i1.159>
- Wulan, N., & Fauzi, A. M. (2025). *The Role of Religious Communities in Democracy and Political Participation in Surabaya*. 19(2).